



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI REPUBLIK INDONESIA  
KE KONPERENSI GABUNGAN PARA MENTERI LUAR NEGERI,  
MENTERI PERMINYAKAN/PERTAMBANGAN DAN MENTERI  
KEUANGAN NEGARA -NEGARA ANGGOTA O.P.E.C.

I. PENDAHULUAN,

1. Sebagaimana telah digariskan MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, politik luar negeri Indonesia harus diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.
2. Didalam melaksanakan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam REPELITA II, Pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa penghasilan dari produksi minyak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat menentukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dewasa ini dan pada waktu-waktu yang akan datang.
3. Namun demikian, Pemerintah Indonesia menyadari pula bahwa usaha-usaha pembangunan yang dilakukannya tidaklah sepenuhnya terlepas dari pengaruh krisis yang menimpa tata perekonomian dunia dewasa ini.
4. Sekalipun masalah minyak bukanlah satu-satunya sebab daripada timbulnya krisis tata perekonomian dunia, tetapi Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa usaha-usaha penyelesaian masalah minyak dan enersi dewasa ini merupakan sumbangan kearah penyelesaian salah satu masalah yang paling mendesak pada waktu ini.

5. Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Dalam hubungan inilah Pemerintah Indonesia memandang bahwa Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair akan mampu memberikan sumbangan kearah terciptanya jalan bagi penyelesaian krisis tersebut.

## II. U M U M.

1. Negara-negara anggota OPEC yang menghadiri konperensi ini pada umumnya adalah negara-negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan ;  
Seperti halnya dengan Indonesia, penghasilan yang diperoleh dari minyak merupakan sumber pembiayaan yang sangat menentukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
2. Agar usaha-usaha pembangunan diatas dapat berjalan, perlu diusahakan langkah-langkah untuk segera menyelesaikan krisis yang menimpa tata perekonomian dunia dewasa ini, sehingga timbulnya akibat-akibat yang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan serta pada akhirnya bahkan mengganggu peri kehidupan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, dapat di tanggulangi.
3. Karena masalah minyak bukanlah satu-satunya sebab yang menimbulkan krisis yang menimpa tata perekonomian dunia, sudah sewajarnya apabila usaha-usaha penyelesaian tersebut dapat dilakukan dalam rangkaianannya dengan penyelesaian sebab-sebab dan masalah-masalah internasional lainnya.

4. Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dalam hubungan ini, sudah semestinya pula apabila dibina langkah-langkah kearah terwujudnya kerjasama antara Negara-negara berkembang terutama penghasil minyak dengan Negara-negara industri pada umumnya, berdasarkan prinsip saling hormat-menghormati kepentingan masing-masing, untuk menciptakan tata kehidupan baru yang lebih baik dan adil.
5. Menghadapi masalah ini, Delegasi Pemerintah Indonesia agar menggunakan hasil-hasil rapat PANJATAB Bidang Luar Negeri (Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional) tanggal 16 Januari 1975 sebagai pegangan disamping keputusan-keputusan Sidang Khusus ke VI Majelis Umum PBB baru-baru ini.

### III. K H U S U S

1. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengusahakan kerjasama Internasional dalam usaha menanggulangi krisis yang menimpa tata perekonomian dunia pada waktu ini, sebagai anggota OPEC Indonesia harus ikut menghilangkan tuduhan-tuduhan bahwa kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di bidang moneter dan perdagangan, kelangkaan pangan serta beberapa bahan-bahan mentah/bahan baku, resesi dan inflasi, bukanlah terutama di sebabkan karena kenaikan harga minyak.
2. Khusus didalam usaha penyelesaian masalah minyak, yaitu agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara Integral, perlu dicegah diambilnya upaya-upaya yang bersifat eksrem dan konfrontatif.  
Dalam hubungan ini, perlu pula dicegah kemungkinan timbulnya prakarsa-prakarsa yang hanya akan melahirkan phenomena-phenomena baru yang disatu pihak berakibat kembalinya dominasi negara-negara industri dan dilain pihak hanya akan lebih memperuncing keadaan/krisis yang sudah ada dewasa ini.

3. Penurunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Penurunan harga minyak jelas akan mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia mengingat bahwa kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan kita adalah besar.

Di samping itu, penurunan harga minyak harus pula dikaitkan dengan kesediaan negara-negara industri maju untuk menyesuaikan/menurunkan harga barang-barang industri yang sangat kita butuhkan untuk pembangunan.

4. Didalam penyelesaian masalah itu semua, Delegasi agar selalu menjaga keutuhan OPEC ke luar, meskipun ke dalam antara sesama anggota terdapat perbedaan posisi baik ekonomis maupun politis.

Delegasi hendaknya mengusahakan agar dialog dilangsungkan antara negara-negara berkembang non-produsen minyak.

Negara-negara OPEC adalah negara-negara berkembang dan merupakan bagian daripadanya. Pelaksanaan suatu konperensi segi tiga dapat memecah adanya dua golongan di kalangan negara-negara berkembang, sehingga membuka kesempatan bagi pihak negara-negara industri/konsumen untuk menggunakan siasat memecahbelah. Kompromi yang tercapai dalam Pertemuan MARTINIQUE mengisyaratkan masih adanya spekulasi negara-negara Industri/konsumen ke arah termaksud.

5. Selain pemecahan masalah minyak, hendaknya diusahakan agar OPEC dapat menyusun rumusan-rumusan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi lain selain masalah minyak.

Khusus prakarsa panitia kecil OPEC untuk menghimpun dana guna membantu neraca pembayaran negara-negara yang terkena oleh tingkat harga minyak sekarang ini, Delegasi harus meyakinkan OPEC bahwa Indonesia belum tergolong negara penghasil minyak yang mempunyai kelebihan cadangan moneter.

6. Namun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Namun demikian, perlu pula diarahkan agar pemanfaatan surplus dollar dari sementara negara-negara OPEC tidak hanya terbatas pada maksud-maksud diatas, melainkan juga dapat dipergunakan untuk menunjang usaha-usaha negara berkembang pada umumnya untuk memperbaiki posisi mereka dalam perdagangan bahan-bahan mentah dan pembangunan.

Dalam hubungan ini setiap usaha yang sejalan dengan Keputusan Sidang Khusus ke-VI PBB mengenai bahan mentah dan pembangunan perlu diperhatikan dan dipergunakan sebagai bahan.

#### IV. HAL - HAL LAIN

Mengenai persoalan-persoalan yang tidak prinsipil, pemecahannya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi, dengan pedoman agar mengambil langkah yang menguntungkan kepentingan Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI